



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HERSAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS MILITER PRESIDEN**
3. NHK : **800756**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.805.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. Tanah Seluas 60 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 516 m<sup>2</sup>/129 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
4. Tanah Seluas 1024 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 488.000.000**

1. MOBIL, HONDA RW3D 2.0 CVT SC / ALL NEW CR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO FIT NF11B2D1 M/T / SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N41L0 A/T Tahun 2021, HADIAH Rp. 5.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S AT F800RE GQGFI Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 240.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 4.460.266.006****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 8.993.266.006**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.993.266.006

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.